

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Awal mula muncul *good corporate governance* karena dilatarbelakangi oleh skandal perusahaan-perusahaan yang ada di Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 1980 dikarenakan perusahaan tersebut hanya mementingkan pihak-pihak tertentu sehingga muncul pertentangan kepentingan, kebebasan pribadi, kepentingan bersama dari organisasi dan tanggungjawab kolektif. Dengan adanya hal tersebut corporate governance berkembang ke negara-negara lain salah satunya Indonesia. Corporate Governance muncul di Indonesia awalnya karena ada usulan penyempurnaan pada Bursa Efek Jakarta yang sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEI (BEI) yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independent dan membentuk komite audit pada tahun 1998, *corporate governance* (CG) mulai di kenalkan pada seluruh perusahaan public di Indonesia.

Dengan begitu pemerintah Indonesia akhirnya membuat suatu lembaga khusus yaitu bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Tahun 2004 pemerintah Indonesia memperluas tugas KNKCG dan mengubah namanya menjadi Komite Nasional Kebijakan (KNKG) yang memperluas cakupan tugas bukan hanya dari sektor korporasi tetapi juga dari sektor pelayanan publik. Kemudian di tahun 2006 disempurnakan lagi pedoman corporate governance agar sesuai dengan perkembangan zaman yang berubah semakin cepat, salah satu yang disempurnakan mengenai pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku, kelengkapan organ perusahaan, dan memperjelas peran tiga pilar pendukung.

Banyak perusahaan Indonesia yang sedang bersungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik karena ada banyak kendala yang dihadapi seperti kendala dari internal karena kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan, kendala dari eksternal yang pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum dan aturan, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan.

Audit internal mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan semakin luas rentang pengendalian yang di tanggung pimpinan, jadi manajemen harus menciptakan suatu pengendalian internal yang efektif untuk mencapai pengendalian yang optimal dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya. Audit internal yang akan membantu manajemen dalam menentukan apakah rencana-rencana operasi, keuangan, kebijakan dan prosedur-prosedur yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga audit internal yang dilakukan dalam suatu perusahaan merupakan kegiatan penilaian dan verifikasi atas prosedur-prosedur, data yang tercatat berdasarkan atas kebijakan dan rencana perusahaan, sebagai salah satu fungsi dalam upaya mengawasi aktivitasnya (Baniswara, 2017)

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu perwujudan dari *good corporate governance*, yang seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten di perusahaan. Fungsi dan proses pengendalian bisa berjalan tidak baik karena ada berbagai macam penyebab salah satunya adalah timbul kecurangan (fraud) di lingkungan perusahaan tersebut. Adapun penyebab lainnya dikarenakan pemegang saham atas *good corporate governance* masih belum memadai dan masih ada penyesuaian. Dengan begitu perusahaan wajib memiliki sistem pengendalian internal yang menjadi peranan penting untuk menjaga aset perusahaan dari tindak kecurangan maupun KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). (Effendi, 2016:88)

Sistem pengendalian internal di BUMN menganut pada pasal 22 ayat 2 dari Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN. Sedangkan Sistem pengendalian internal pada perusahaan publik pada praktik bisnis yang terbaik di dunia internasional mengharuskan perusahaan yang *go public* atau terdaftar di pasar modal untuk menerapkan kerangka sistem pengendalian internal dan mengevaluasi serta melaporkan pengendalian internal secara tersendiri. Semua itu dilakukan oleh CEO dari perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan transparansi serta akuntabilitas perusahaan kepada publik. (Baniswara, 2017)

Suatu perusahaan berkewajiban menerapkan *good corporate governance* khususnya BUMN. Karena langkah ini sangat penting untuk memaksimalkan dan meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan prinsip (keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya), dan mendorong perusahaan yang profesional. Mengamati kasus-kasus yang ada di perusahaan publik ataupun BUMN masih belum sepenuhnya diterapkan karena ada beberapa penyebab. Good corporate governance memang bukan satu-satunya faktor untuk memajukan reformasi bisnis tetapi merupakan salah satu kunci untuk menumbuhkan kepercayaan para investor dan mempertahankan agar masih percaya bahwa laporan yang disajikan sudah sesuai aturan yang berlaku dan transparan.

Kasus yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah PT. KAI. Hal ini terjadi karena kasus pelanggaran kode etik profesi akuntansi, diduga terjadi manipulasi data keuangan pada tahun 2005, perusahaan BUMN tercatat meraih laba sebesar Rp 6,9 Miliar, padahal apabila diteliti lebih rinci perusahaan BUMN ini mencatat kerugian sebesar Rp 63 Miliar. Kasus ini bermula akibat adanya pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahun 2005 laporan keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung

jawab. Banyak terdapat kejanggalan dalam penyajian laporan keuangan seperti data yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Ini menimbulkan permasalahan, karena auditor menyatakan opini Laporan Wajar Tanpa Pengecualian, tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi yang telah ditetapkan. Laporan keuangan PT KAI diaudit oleh kantor akuntan publik sejak tahun 2004, namun berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pihak BPK terlibat dalam sebagai auditor PT KAI (Janitra, 12 Agustus 2017).

Dengan terjadinya kasus PT. KAI diatas menunjukkan bahwa PT. KAI telah melanggar prinsip dasar *good corporate governance* yaitu Transparansi dan Independensi. Karena sudah memanipulasi jumlah laba padahal apabila diteliti mengalami kerugian, hal ini menunjukkan tidak adanya prinsip transparansi. Dan pihak-pihak yang terlibat dalam memanipulasi data tersebut juga tidak independen baik audit internal yang ada di perusahaan maupun auditor yang memeriksa laporan keuangan tersebut sudah mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Unqualified Opinion. Kasus diatas bisa terjadi tidak terlepas dari peran audit internal dan pengendalian internal yang sangat berpengaruh dalam tata kelola perusahaan. Karena kedua elemen tersebut sangat penting dalam menentukan apakah *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan bisa dijalankan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah diatur apa tidak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengetahui sejauh mana hubungan pelaksanaan audit internal dan pengendalian internal dalam mewujudkan *good corporate governance*. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal dalam Penerapan *Good Corporate Governance*”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*?
3. Apakah audit internal dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance*

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*?
2. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*?
3. Untuk menganalisis apakah audit internal dan pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance*?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi:

1. Mahasiswa
  - a) Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana peranan audit internal dan pengendalian internal dalam penerapan *good corporate governance*.
  - b) Ilmunya bisa dijadikan penerapan untuk bisa diterapkan di dunia kerja nantinya.
2. Perusahaan

Sebagai bahan pelengkap dan masukan serta sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan khususnya mengenai audit internal dan pengendalian internal dalam penerapan *good corporate governance*.

### 3. Masyarakat

Dari hasil peneliti ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai audit internal dan pengendalian internal dalam penerapan *good corporate governance* serta dapat menambah wawasan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

### 4. Akademik

- a) Bisa memberikan wacana untuk pengembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan auditing dan *good corporate governance*
- b) Dapat memberikan kontribusi sumbangan pikiran tentang Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal dalam *good corporate governance*.